

PENGEMBANGAN *E GOVERNMENT* MELALUI WEBSITE KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Ningmabin
NPP: 31.1001

Asdaf Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua
Pegunungan Program Studi Teknologi Rekayasa
Informasi Pemerintahan Email: [32.1070@praja](mailto:32.1070@prajaipdn.ac.id)
ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ruth Roselin E. Nainggolan, SP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The writer focuses on the issues of the web pages on the Government Website of Pegunungan Bintang Regency that have not been filled with data and information (still empty). The information presented on the website is still not up to date. Purpose:* *The purpose of this research is to understand the development of e-government through the website of the Pegunungan Bintang Regency Government. Method:* *This research uses descriptive qualitative methods and efforts of e-government development according to the Theory of JFK Harvard School. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews (5 informants), observation, and documentation. Results/Findings: The findings obtained by the author in this research indicate that the implementation of e-Government development in Pegunungan Bintang Regency still faces various challenges, including limited technology infrastructure, inadequate human resources, and a lack of public understanding of the benefits of digital technology in public services. Nevertheless, there are adequate budgeting efforts for the website and training for employees in web management. Conclusion:* *the development that has been carried out by the local government in this case. The Communication and Information Office of Pegunungan Bintang Regency has been functioning quite well regarding the website, which is due to the adequate budget for operations so that the website can be accessed, and there has been training for the staff of the Communication and Information Office to provide quality information access on the website. It is recommended to improve the infrastructure and human resources as well as the regent's regulations that support the development of e-government in Pegunungan Bintang Regency. Keywords: E-Government, government website, public services.*

Keywords: *E-Government, Government Website, Public Services,*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penulis berfokus pada permasalahan halaman web pada situs Web Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang belum terisi data dan informasi (masih kosong). Informasi yang disajikan dalam Situs Web masih belum up to date. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan e government melalui website Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Metode:* *Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan upaya pengembangan e government menurut Teori JFK Harvard School. Teknik pengumpulan*

data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan e-Government melalui website Kabupaten Pegunungan Bintang masih menghadapi berbagai hambatan pada tiga elemen kunci. Pada aspek support, belum tersedia kerangka hukum yang jelas serta minimnya sosialisasi baik ke internal birokrasi maupun kepada masyarakat. Pada aspek capacity, ditemukan keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur pendukung seperti perangkat digital dan ruang khusus, serta rendahnya partisipasi dan kesiapan sumber daya manusia, meskipun sudah ada pelatihan. Sementara pada aspek value, website pemerintah daerah belum memberikan manfaat optimal kepada masyarakat karena belum terintegrasi dengan fitur layanan pengaduan maupun sistem pembayaran daring, dan belum mendorong interaksi dua arah. **Kesimpulan:** Secara umum, pengembangan e-Government melalui website Kabupaten Pegunungan Bintang masih berada pada tahap awal dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi pendukung, terbatasnya kapasitas keuangan dan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat akibat tidak adanya fitur layanan yang relevan dan interaktif. Implementasi e-Government yang efektif memerlukan dukungan regulasi yang kuat, penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi yang memberikan nilai nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat. **Kata kunci:** *E-Government*, Website Pemerintah, Pelayanan Publik,

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital yang berkembang pesat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan menjadi keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Salah satu wujud implementasi TIK dalam pemerintahan adalah e-Government, yaitu penggunaan teknologi oleh instansi pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warga negara, pelaku usaha, dan lembaga lainnya secara daring. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap e-Government melalui berbagai regulasi, seperti Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang *Strategi Nasional dan Kebijakan Pengembangan e-Government* Namun, hingga saat ini pengembangan e-Government di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintah daerah, masih menghadapi banyak tantangan. Laporan *United Nations E-Government Survey 2022* menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 193 negara, (Vinet, 2008) menandakan bahwa meskipun ada kemajuan, implementasi e-Government belum optimal. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kurang efektifnya website resmi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Website memudahkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan kebijakan, peraturan, anggaran, dan laporan kinerja secara terbuka. Hal ini mendukung prinsip *good governance* dan mencegah praktik korupsi (Kristina, 2019), masyarakat juga dapat mengakses informasi pemerintahan kapan saja tanpa terikat jam kerja kantor, sehingga meningkatkan keterhubungan antara pemerintah dan warga. Proses administrasi seperti perizinan dan pengaduan bisa diotomatisasi, mengurangi beban kerja pegawai dan risiko kesalahan manual. Fitur survei, forum, atau pengaduan online memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran langsung. Pemanfaatan teknologi informasi dalam e-Government bahkan telah diperluas ke ranah inklusi sosial, seperti yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi *SI VOTUN* untuk penyandang disabilitas tunanetra guna menjamin kesetaraan akses informasi (Qanita, 2023) .

sehingga kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kampanye, sosialisasi program, dan pengumuman kegiatan daerah dapat disebarluaskan lebih cepat dan menjangkau segmen yang lebih luas, termasuk kalangan muda yang aktif di internet. Dengan adanya website pemerintah daerah yang aktif dapat mempromosikan potensi wisata, UMKM, dan investasi (Nurrahman et al., 2021). Hal ini menarik calon investor dan wisatawan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Website yang aktif, terkelola baik, dan informatif mencerminkan profesionalisme dan komitmen pemerintah daerah dalam melayani warganya, sehingga meningkatkan kepercayaan public Digitalisasi layanan melalui website mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik, kunjungan langsung ke kantor, serta mempercepat proses birokrasi. Sehingga website pemerintah daerah memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan akurat, seperti profil daerah, peraturan, program kerja, anggaran, serta hasil kinerja pemerintah. Hal ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki situs web dengan alamat link <http://pegbintangkab.go.id/>. Website Pemerintah Daerah ini selain sebagai media penyampaian informasi resmi pemerintah terkait program pembangunan, capaian kinerja, tetapi juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh semua warga masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan umumnya rakyat Indonesia.(Dolly B. Komba, 2023). Dengan adanya website diharapkan memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel pada lingkungan kabupaten Pegunungan Bintang, alasan dipilihnya website ini adalah agar Upaya pengembangan terhadap website lebih dikembangkan baik dari pemerintah dan Masyarakat itu sendiri sehingga dapat memberi mutu pelayanan yang berkualitas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun beberapa permasalahan berkaitan dengan pengembangan *e government* khususnya web kabupaten pegunungan Bintang dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu oleh (Dolly B. Komba, 2023) bahwa secara umum halaman web belum terisi data dan informasi (masih kosong). Informasi yang disajikan dalam Situs Web masih belum *uptodate*, maka bisa dipastikan Situs Web ini belum memberikan manfaat bagi publik maupun juga internal Pemerintah Daerah.

Situs Pemda idealnya menjadi sarana interaksi dua arah, seperti forum diskusi, layanan pengaduan, atau survei publik. (Puskomedia, 2025) Namun, website Kabupaten Pegunungan Bintang hanya bersifat satu arah (informasi dipublikasikan tanpa ada ruang partisipasi masyarakat). Padahal, era digital menuntut layanan publik yang responsif dan partisipatif. Ketidakterpenuhinya fitur interaktif ini memperlebar kesenjangan antara ekspektasi warga dan realita pelayanan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya artikel yang ditulis Alif dan Warsono, berjudul Analisis Pengembangan E-Government Dalam Penyediaan Akses Informasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Alif & Warsono, 2019) menemukan Pengembangan E-Government dalam Penyediaan Akses Informasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, terdapat permasalahan pada tahap-tahap pengembangan e-government di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak pada penyediaan akses informasi. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya: (1) Tahap Persiapan: masih terdapat kendala terkait website yang tidak bisa diakses, masih kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana akses masih terbatas, sistem sosialisasi yang kurang konsisten; (2) Tahap Pematangan: website belum memiliki system interaktif, (3) Tahap Pematapan: Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki situs

transaksi pelayanan. Perlunya akses informasi melalui perpustakaan online, seperti yang dikelola oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sangat penting dalam mendukung literasi, pendidikan, dan transparansi layanan public Akses yang mudah ke koleksi digital memungkinkan pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum untuk mendapatkan bahan bacaan dan sumber belajar yang relevan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Ini mendukung pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Penelitian Rolania Batubara, Helmy, Herlina menemukan Belum kuatnya payung hukum terkait penerapan e-government di Pemerintah Padang Pariaman., terbatasnya sumber daya manusia baik dari secara kualitas maupun kuantitas karena beberapa pegawai ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Terbatasnya sumber daya finansial, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu layanan e-government.(Rolania Batubara & Helmy, 2019) penelitian Nugraha menemukan Dukungan penerapan e-government dalam pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman meski belum optimal, hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus di samping alokasi anggaran yang berbeda-beda di setiap OPD. Pada sisi kemampuan, secara umum tingkat literacy pegawai Pemkab Sleman masih rendah terutama para pegawai senior. Sementara pada sisi nilai, para pengelola e-government di Pemkab Sleman sudah memahami manfaat dan pentingnya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.(Nugraha, 2018). Astuti dan Jotmoko menemukan dalam artikel berjudul analisis pengembangan electronic government di kabupaten demak (studi kasus website pemerintah kabupaten demak) Di Kabupaten Demak menurut Diskomnfo kabupaten Demak mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Masih sedikit jumlah pegawai di beberapa instansi yang mampu menguasai bidang TI menjadi kendala. Sehingga masih banyak instansi yang memerlukan jasa atau bantuan dari Dinkominfo untuk pengelolaan website. Pemberian pelatihan mengenai informatika dirasa belum dapat mengatasi permasalahan ini, dikarenakan factor usia pegawai dan sulitnya adaptasi dengan teknologi baru. Di kabupaten Demak mengenai pendanaan pengembangan e- government masih dirasa kurang. Banyaknya instansi yang belum tercukupi anggaran untuk pengembangan e- government.(Jatmiko & Astuti, 2018). Maharani dkk dalam penelitian mereka menemukan Secara umum pengembangan e- government sebagai langkah perwujudan smart government di Kota Padang Panjang melalui hasil penelitian yang diperoleh ketiga elemen ini terpenuhi dengan baik. Akan tetapi masih diperoleh kendala dalam proses implementasinya yaitu pada elemen capacity khususnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan server dan jaringan yang terkadang bermasalah.(Medina Maharani1 et al., 2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengembangan e government melalui website pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang yang seharusnya memiliki upaya pengembangan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif juga berbeda dengan penelitian Astuti, Nugraha, maupun warsono dkk.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realisasi elemen elemen sukses Pengembangan E-Government melalui website kabupaten Pegunungan Bintang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori elemen elemen sukses pengembangan e government. (Indrajit, 2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengembangan e-Government melalui website Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam proses, tantangan, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap implementasi e-Government di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan geografis.

Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena sesuai untuk memahami secara mendalam proses, hambatan, dan potensi dalam pengembangan e-Government yang terjadi di konteks lokal, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Mengingat bahwa pengembangan e-Government merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan banyak aspek kelembagaan, sosial, dan teknis, maka dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan *apa* yang terjadi, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* hal itu terjadi. sebagai pelengkap analisis, penelitian ini juga merujuk pada indikator PeGI (Peringkat e-Government Indonesia) yang mencakup dimensi kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan (Rahmadany, 2021).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi data digunakan untuk memperkuat validitas temuan. Penulis mewawancarai tujuh orang informan yang dianggap relevan dan memiliki peran penting dalam pengembangan dan penggunaan website pemerintah daerah. Informan tersebut terdiri dari Sekertais dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala bidang Infokom Kantor dinas Komunikasi dan Informatika, dua orang admin website dan tiga orang rakyat sipil. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan siapa yang paling mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan, pemanfaatan, dan persepsi terhadap e-Government di kabupaten tersebut. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, karena memiliki otoritas dan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan serta pelaksanaan program digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data dari sisi pengambil kebijakan, pengelola teknis, serta masyarakat sebagai pengguna akhir, sehingga gambaran implementasi e-Government menjadi komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, dan observasi dilakukan pula pada tampilan website resmi serta aktivitas pengelolaan media sosial pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari Januari hingga february 2025. Dimensi evaluasi implementasi e-Government juga telah dikembangkan dalam indeks PeGI (Peringkat e-Government Indonesia), yang mencakup lima aspek utama: kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Dimensi ini dapat melengkapi elemen support, capacity, dan value dari pendekatan Harvard School dalam menganalisis keberhasilan e-Government (Rahmadany, 2021)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengembangan e government melalui website kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan teori eleme sukses *JFK Harvard School* yang memuat elemen *support*, *capacity* dan *value*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Support

Penulis melakukan analisis pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap website dari elemen *support* yang Dimana terdapat dimensi adanya kerangka kerja hukum yang jelas dan adanya

sosialisasi yang dilakukan untuk mendukung website

3.1.1 Adanya Kerangka Kerja yang Jelas

Adanya kerangka kerja berkaitan dengan adanya peraturan terkait *E-Government*, Standar Operasional Prosedur terkait prosuk *E-government* di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal tersebut dapat dipastikan berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Agetha Uropmabin, berikut: “Kita Pegunungan Bintang ini tidak ada peraturan daerah apapun, misalnya peraturan begini atau peraturan penurunan harga barang begitu tidak ada peraturan sama sekali, sebenarnya itu harus ada hanya itu kebijakan dari pimpinan untuk lakukan itu ada. Selama penelitian, peneliti menemukan informan atas nama Bryan, salah satu admin website Pemerintah, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang menyatakan hal senada: “ Sempat saya buat instagram juga ada untuk upload-upload kegiatan pemerintahan, tapi akun itu sudah tidak dipake lagi, untuk jalankan akun juga peralatan kurang, tiap tahun itu selalu diajukan untuk pengadaan peralatan tapi tidak pernah dijawab jadinya hanya website untuk update-update informasi begitu, SOP untuk website belum ada. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti pada website kabupaten Pegunungan Bintang yang tidak terdapat produk hukum, Standar Operasional Prosedur dari dinas Komunikasi dan Informatika terkait Website, padahal Penelitian (Tambunan 2021) menekankan pentingnya keberadaan regulasi digital dalam menunjang operasionalisasi website pemerintah daerah, karena tanpa dasar hukum yang kuat, pengelolaan website akan stagnan. Hal ini sejalan dengan temuan (Batubara & Helmy,2019) dan (Jatmiko & Astuti,2018) yang menyoroti lemahnya dasar hukum dan koordinasi kelembagaan sebagai kendala dalam implementasi e-Government di daerah. Bahkan dalam konteks internasional, (AlAwadhi dan Morris,2009) menekankan bahwa dukungan kebijakan dan struktur kelembagaan yang jelas merupakan faktor krusial dalam adopsi e-Government, terutama di negara berkembang.

3.1.2. Sosialisasi *E-Government*

Produk atau program pemerintah yang baru dibuat tentu tidak semua kalangan masyarakat dapat mengenal produk tersebut, sehingga perlu dilakukan pengenalan yang menyeluruh kepada Masyarakat agar dapat dipahami dan dipergunakan dengan baik Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang Agetha Uropmabin, terkait pengenalan ke SKPD” sosialisasi *E-Government* yang dilakukan, ditemukan bahwa: “Sebenarnya itu bukan di tingkat masyarakat itu di tingkat Birokrasi saja jadi informasi itu, informasi berisi kegiatan yang dilakukan SKPD saja, jadi sudah ada Hal senada juga disampaikan Bryan sebagai admin website terkait pengenalan yang dilakukan, Bryan mengatakan “sudah.iyo sudah ada juga yang pake, macam UKPBJ ada pake terus ada group semua SKPD itu kita buang web itu kedalam nanti mereka masuk sendiri begitu” Lain di bergabung tahun 2014” halnya dengan pendapat salah satu pegawai Humas pengunjung website Kabupaten Melkianus Uropmabin yang telah lama menjadi penulis berita website Sinarweng yg menyatakan: “belum ada semenjak saya bergabung tahun 2014” Namun belum adanya pembaharuan atau pengenalan kepada 52 masyarakat didukung juga dengan pernyataan prapasia salah satu warga pengunjung web “iya sudah jarang saya kunjungi lagi karena tidak ada pembaharuan” Pernyataan informan pengunjung web juga didukung dengan hasil pengamatan peneliti bahwa tidak terdapat sosialisasi ke skpd maupun Masyarakat terkait website Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

3.2 Capacity (kemampuan)

3.2.1 Ketersediaan Sumber Daya Keuangan

Menurut hasil wawancara dengan Bryan salah admin website Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan bahwa: “untuk sewa hosting tiap tahun itu 100 juta per tahun, itu sewa hosting untuk perpanjang setiap tahun kalau biaya pembuatannya itu kalau tidak salah sekitar 300 juta” Sementara itu Agustinus Uropmabin selaku kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, bidang yang menjalankan peran langsung pengelolaan Website Kabupaten mengatakan “ iya sudah berapa kali kerja sama dengan Okmin ini 100 juta per tahun, itu dari APBD melalui dinas untuk kelola website itu”. Pemeliharaan dan operasional website selama satu tahun diberikan biaya sebesar 100 juta dari dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang dan untuk biaya awal pembuatan website sebesar 300 juta yang dianggarkan dari dinas Komunikasi dan Informatika,

Tabel 1
Biaya operasional Tenaga Okmin TV

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Nominal (Rp)
1.	Ahli Teknologi Informasi	1	15.000.000
2.	Ahli Programmer Web	1	12.000.000
3.	Ahli Desain Web	1	12.000.000
4.	Asisten Programmer	1	8.000.000
5.	Asisten Analisa Sistem	1	8.000.000
6.	Operator Web	12	45.000.000
	Jumlah	17	100.000.000

Anggaran yang disediakan Dinas komunikasi dan informatika kurang memadai untuk mengoperasikan dan mengupdate informasi ke website menurut Bryan salah satu admin web sebagaimana hasil wawancara berikut: ” peralatan kaya kamera drone dan perlengkapan lain untuk mendukung webste ini kalau tidak ada susah mo jalankan jadi selama ini belum ada peralatan yang mendukung, sudah masuk tahun ke tiga sa ajukan ke BAPEDA tapi belum dijawab sampe yang ada ini jadi sulit mo kelola website terus media lainnya ” Dalam mengoperasikan website atau media facebook dan instragram menurut penjelasan Bryan diatas akan sulit jika kurang terdapat perlatan pendukung seperti kamera, drone dan alat pendukung lain. peralatan pendukung tersebut belum ada di dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pegunungan Bintang Menurut pengamatan peneliti sarana infrastruktur seperti kamera dan drone serta alat lain belum ada di dinas dan ini menjadi hambatan dalam terus mengupdate informasi ke website seperti

yang dijelaskan Bryan admin website diatas. Sehingga perlu adanya penambahan biaya anggaran agar website tetap terupdate dengan berita terbaru

3.2.2 Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Berkut hasil wawancara dengan sekretaris dinas komunikasi dan informatika kabupaten Pegunungan Bintang Agetha Uropmabin, “untuk Komputer dan jaringan wifi sudah ada namun kalau pengelolaan website 56 itu dari pihak ketiga sehingga tidak ada di kantor diskominfo tapi diluar daerah” Menurut Bryan admin website pemerintah daerah terkait ruangan khusus untuk web, menambahkan “kantor kita masih gabung dengan perhubungan jadi ruangan cuma 2 (dua) sekat seblah-seblah” dari penjelasan sekretaris Dinas dan Bryan terdapat ruangan yang dipisahkan dan dibagi dua bagian dengan pembatas yang berisi beberapa komputer dan jaringan wifi untuk mendukung pengoperasian pekerjaan kantor namun belum adanya ruang khusus untuk mengoperasikan website karena selama ini operasional website dilakukan pihak ketiga diluar kantor. (Sihombing, 2023) mencatat bahwa infrastruktur di wilayah terluar seperti Papua Pegunungan sangat terbatas dan menjadi hambatan utama dalam implementasi e-Government

Tabel 2

Jumlah dan Kondisi Infrastruktur Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Pegunungan Bintang

No.	Barang	Jumlah	Keadaan	Tahun
1	Computer dan server	4	hilang	2023
2	Laptop pribadi	7	Baik	2010-2021
3	Router wifi	2	Baik	2023

3.2.3 Kesiapan Sumber Daya Manusia

Terdapat 2 (dua) pegawai yang merupakan admin untuk menulis berita dari lapangan, dan ada satu masteradmin yang menyetujui berita tersebut untuk diupload ke website, salah satu admin tersebut adalah Bryan yang mengatakan “Iya, benar. Saya salah satu admin website pemda. Jadi kami ada dua orang, kami menulis berita dari kejadian di lapangan lalu meneruskannya kepada masteradmin untuk dikoreksi dan diupload ke web kalo koreksi sudah diperbaiki” Untuk admin yang menulis berita sudah ada namun tidak diupdate di website karena yang punya wewenang untuk update adalah masteradmin yang ada diluar kota dalam hal ini adalah pihak okmin tv hal demikian disampaikan Fabi salah satu admin web berikut “pernah saya 60 diundang SKPD turun untu menulis berita ini saya buat tapi mereka tidak kasih naik,

dari situ saya bicara bahwa tidak bisa lagi saya buat karena tidak akan diupload” Dari segi kemampuan menulis berita untuk dua admin yang ada sudah mencukupi karena untuk kelola web tidak butuh kemampuan khusus seperti programmer hanya perlu pemahaman yang cukup untuk kelola komputer dan website hal tersebut dapat dikaji melalui pernyataan Bryan berikut: “Kalau saya pikir, kemampuan teknologi informasi itu tidak terlalu dibutuhkan namun yang paling utama adalah kemampuan menulis dan memahami cara kendalikan komputer dan memakai web” Untuk kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai laporan dari media Okmin news harus ada ahli teknologi informasi ahli programmer web base ahli website mengatakan: desain web dan operator web, namun tenaga yang sering kelola website hanya dua orang penulis berita dan masteradmin untuk mengupload berita ke website Sumber daya manusia yang dimaksud yang terdapat di dinas Komunikasi dan Informatika Pegunungan Bintang, Bryan selaku admin “ kurang sekali, mulai dari SDM juga kurang, kita sudah Bimtek sudah dua kali tapi, bagaimana e teman teman juga diatas tahu sendiri to kondisi. Kita ajak juga susah nanti kalo mo bimtek ka itu mo baku rebut nanti, tapi setelah pulang dari sana tra mau jalankan, padahal sudah paham, dari sana bikin berita, paham tapi datang sini tramau lanjut, tramau jalan jadi susah juga, sudah 2 kali bimtek, ada satu masteradmin website yang Kelola web kami hanya buat berita saja nanti masteradmin yang upload, sa su buat banyak berita, bimtek husus Kelola website tidak usah berita lagi “ Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan: Agetha Uropmabin, terkait sumber daya manusia, “ sudah ada 2 (dua) kali pelatihan keluar kota terkait website, 2022 itu diaktifkan, 2023 pelatihan, 2024 kemarinpun pelatihan sudah ada usaha diskominfo untuk mengembangkan pegawai yang ada tapi tinggal pemanfaatan saja, baik itu pegawai itu sendiri, Masyarakat atau SKPD lain yang melaksanakan kegiatan dan program yang dijalankan “. (Gultom dan SimanjuntakM 2020) menegaskan bahwa peningkatan literasi teknologi ASN harus menjadi bagian dari pelatihan berkelanjutan agar hasilnya tidak bersifat temporer. Selain itu, menurut (Sihite, 2020), insentif yang sesuai dapat mendorong pengelola website untuk lebih aktif memperbarui konten secara berkala.

3.3. Value (manfaat Bagi Masyarakat)

Untuk memahami pentingnya manfaat bagi pengembangan produk produk e- government, salah satu dari manfaat penerapan e-government yang dirasakan masyarakat adalah meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat serta memfasilitasi pemberian layanan. Selain itu, pengembangan e-government mengurangi biaya yang dikeluarkan, meningkatkan efisiensi. Menurut Prapasia Ningmabin, salah satu rakyat pengunjung website “iya sudah jarang saya kunjungi lagi karena tidak ada pembaharuan untuk pengaduan ke Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat begitu, sama kalau ada penghematan biaya yang dirasakan kaya pembayaran jasa produk begitu belum ada di website jadi saya pikir website belum bantu mengurangi biaya yang dikeluarkan dari masyarakat” Hal senada disampaikan siktus Sitokmabin salah satu mahasiswa Bandung yang sempat mengunjungi website mengatakan “untuk adanya fitur pengaduan saya kira tidak bagus karena sebagian besar masih satu arah, meskipun ada fitur pengaduan (seperti LAPOR), interaksi dua arah belum optimal atau bersifat terbatas. Terus untuk pembayaran yang memudahkan kami saya lihat belum ada, belum ada fitur layanan interaktif dua arah seperti pelayanan pelaporan yang baik serta belum memudahkannya pembayaran yang dilakukan masyarakat terkait produk pelayanan pemerintah Informasi yang dipaparkan Siktus juga Prapasia serta menurut pengamatan peneliti memang belum ada fitur pengaduan dan layanan Pembayaran masyarakat, Hal tersebut berkaitan juga dengan pelayanan efektif yang belum ada

di website Kabupaten Pegunungan Bintang. kondisi ini serupa dengan yang ditemukan oleh (Kawuryan, 2019), di mana website Pemerintah Kota Depok masih berada pada tahap *presence* dan *interaction*, namun belum optimal dalam menampung keluhan masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan informasi aktual dan layanan daring secara real-time. Padahal, menurut (Chen et al. 2019), integrasi sistem e-government yang efektif harus mampu melintasi batas struktural dan organisasi guna menghasilkan performa layanan publik yang lebih baik dan responsif, termasuk memberikan manfaat langsung bagi warga melalui fitur kolaboratif dan keterlibatan digital yang tinggi masyarakat akan semakin antusias untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mendukung implementasi *e-government*. Menurut (Hutapea, 2022), pengaduan digital dan kanal partisipasi warga yang efektif mampu meningkatkan responsivitas pelayanan publik berbasis digital. Ini sejalan dengan penelitian Tamba (2023) yang mendorong integrasi situs web dengan platform nasional seperti LAPOR atau SIMPATIK

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan e-Government di Kabupaten Pegunungan Bintang melalui website resmi pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam tiga elemen utama menurut kerangka teori Harvard JFK School: support (dukungan), capacity (kapasitas), dan value (nilai/manfaat).

1. *Support* (Dukungan)

Temuan menunjukkan bahwa tidak adanya peraturan daerah atau SOP (standar operasional prosedur) yang mengatur pengelolaan website menjadi hambatan serius dalam kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Batubara & Helmy, 2019) dan (Jatmiko & Astuti, 2018) yang menyoroti lemahnya dasar hukum dan koordinasi kelembagaan sebagai kendala dalam implementasi e-Government di daerah. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada masyarakat turut memperlemah pemanfaatan layanan digital, sebagaimana diamini oleh warga yang jarang mengunjungi website karena tidak ada pembaruan informasi.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Dari sisi kapasitas, kendala muncul pada ketersediaan anggaran yang terbatas, kurangnya infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Meskipun anggaran untuk hosting dan pembuatan website telah tersedia (Rp 100 juta/tahun untuk hosting dan Rp 300 juta untuk pembuatan awal), namun tidak diimbangi dengan pengadaan peralatan pendukung seperti kamera atau drone, yang penting untuk memperbaharui konten website. Hal ini memperkuat temuan (Nugraha, 2018) dan (Medina Maharani et al., 2021), yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal dan infrastruktur menjadi penghambat signifikan dalam optimalisasi *e-Government*. Sumber Daya Manusia yang tersedia juga masih belum maksimal; hanya ada dua admin berita dan satu masteradmin dari pihak ketiga yang mengelola website. Kondisi ini mencerminkan persoalan yang sama seperti di Kabupaten Demak menurut (Astuti & Jatmoko, 2018) yaitu kekurangan tenaga TI internal dan rendahnya efektivitas pelatihan pegawai karena kendala usia dan kurangnya motivasi.

3. *Value* (Manfaat)

Dari aspek manfaat, website Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang belum mampu menghadirkan layanan interaktif dua arah seperti pengaduan publik atau pembayaran layanan. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat serta rendahnya persepsi terhadap nilai tambah dari website pemerintah. Temuan ini senada dengan pendapat Prapasia dan Siktus, yang menyatakan bahwa layanan yang tersedia masih bersifat satu arah, kurang responsif, dan belum

menghadirkan fitur layanan publik seperti pembayaran online. Ini menegaskan pentingnya e-Government tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana interaktif yang mendukung efisiensi pelayanan publik. (Napitupulu, 2023) menyatakan bahwa website pemerintah yang menyajikan informasi pembangunan dan kinerja secara terbuka berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat. Selain mengacu pada teori Harvard JFK School, temuan ini juga selaras dengan kerangka evaluasi dari (Choi et al., 2016), yang menekankan bahwa keberhasilan e-Government di negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana sistem digital tersebut *dirasakan bernilai* oleh masyarakat dan seberapa baik koordinasi antarlembaga pemerintahan berjalan. Dalam konteks Kabupaten Pegunungan Bintang, minimnya fitur interaktif pada website dan tidak adanya sistem pelaporan/pengaduan mencerminkan rendahnya persepsi nilai guna oleh warga. Hal ini menjadi hambatan besar dalam mendorong adopsi digital secara luas. Penilaian manfaat e-Government yang rendah sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, turut sejalan dengan kerangka evaluasi yang dikemukakan oleh (Gupta dan Jana, 2003), di mana efektivitas e-government tidak hanya ditentukan oleh keberadaan platform digital, tetapi juga oleh keterlibatan publik, responsivitas layanan, dan nilai tambah yang dirasakan langsung oleh pengguna.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan *e-Government* di Kabupaten Pegunungan Bintang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tiga elemen utama menurut teori *JFK Harvard School*, yaitu: *Support* (Dukungan): Tidak adanya kerangka hukum yang jelas seperti Peraturan Daerah dan SOP menjadi hambatan serius. Sosialisasi masih terbatas di lingkungan birokrasi dan belum menyentuh masyarakat secara luas. *Capacity* (Kapasitas): Terdapat keterbatasan dana, infrastruktur teknologi, serta sumber daya manusia. Biaya operasional dan pengadaan peralatan tidak memadai. Infrastruktur seperti ruangan khusus, perangkat keras, dan koneksi masih belum optimal. SDM terbatas dalam kuantitas dan sebagian tidak termotivasi untuk menerapkan hasil pelatihan. *Value* (Manfaat bagi Masyarakat): Manfaat yang dirasakan masyarakat dari e-Government masih minim. Website belum menyediakan fitur interaktif, pengaduan, maupun kemudahan layanan publik yang diharapkan, seperti sistem pembayaran online atau pelayanan dua arah. Dengan demikian, pengembangan e-Government di Kabupaten Pegunungan Bintang masih bersifat formal dan belum berdampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik.

Keterbatasan Penelitian. Data yang digunakan bersifat kualitatif dan hanya bersumber dari wawancara beberapa informan kunci, sehingga tidak mencakup perspektif seluruh *stakeholder* (masyarakat luas, pejabat legislatif, penyedia layanan TI, dll.). Fokus hanya pada website pemerintah daerah, tanpa membandingkan dengan kanal *e-Government* lain (seperti aplikasi mobile atau media sosial resmi). Ruang lingkup terbatas di Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain. Tidak ada uji efektivitas atau kepuasan pengguna secara kuantitatif, misalnya melalui survei atau metrik kunjungan website.

Arah Masa Depan Penelitian. Studi komparatif antar daerah untuk melihat strategi sukses pengembangan e-Government di wilayah dengan tantangan serupa. Penelitian kuantitatif terhadap kepuasan masyarakat, untuk menilai efektivitas e-Government dari perspektif pengguna. Pengkajian strategi peningkatan literasi digital bagi pegawai dan masyarakat agar

implementasi e-Government dapat dimaksimalkan. Riset pengembangan arsitektur sistem e-Government yang berkelanjutan, efisien, dan sesuai kondisi geografis/teknis daerah terpencil. Evaluasi integrasi website dengan sistem pelayanan publik lainnya, seperti SIMPATIK, LAPOR

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- AlAwadhi, S., & Morris, A. (2009). The use of e-government tools in developing countries: The case of Oman. *International Journal of Information Management*, 29(4), 260–271. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.03.004>
- Alif, M., & Warsono, H. (2019). Analisis pengembangan e-government dalam penyediaan akses informasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 8(4), 510–524.
- Anangkota, M. (2018). Implementasi e-Government: Ketersediaan dan daya akses website pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(3), 197–199.
- Batubara, R., & Helmy, H. (2019). Analisis pengembangan electronic government melalui penyelenggaraan website di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1666–1686. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.169>
- Chen, Y.-C., Hu, L.-T., Tseng, K.-C., Juang, W.-J., & Chang, C.-K. (2019). Cross-boundary e-government systems: Determinants of performance. *Government Information Quarterly*, 36(3), 449–459. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.019>
- Choi, H., Park, M. J., Rho, J. J., & Zo, H. (2016). Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries. *Telecommunications Policy*, 40(7), 644–659. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002>
- Gupta, M. P., & Jana, D. (2003). E-government evaluation: A framework and case study. *Government Information Quarterly*, 20(4), 365–387. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(03\)00041-8](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(03)00041-8)
- Gultom, Y., & Simanjuntak, H. (2020). *Literasi teknologi aparatur sipil negara di era digital*. Jakarta: IPDN Press.
- Harahap, R. A. (2023). *Membangun transparansi melalui sistem informasi publik*. Bandung: IPDN Research Center.

- Hutapea, M. (2022). *Pelayanan publik interaktif berbasis teknologi*. Medan: IPDN Sumatera.
- Jatmiko, A. A., & Astuti, R. S. (2018). Analisis pengembangan electronic government di Kabupaten Demak (studi kasus website Pemerintah Kabupaten Demak). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4). <http://fisip.undip.ac.id>
- Kawuryan, M. (2019). The improvement of information technology (website) in supporting governance communication in Kota Depok, Province of West Java. *International Journal of Kybernology*, 4(1), 27–36. <https://doi.org/10.33701/ijok.v4i1.642>
- Komba, D. B., & Suryana, M. N. (2023). Evaluasi kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Prosiding Seminar Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.31284/p.semtik.2023-1.4047>
- Kristina, A. (2019). Penerapan e-government di Indonesia sebagai upaya pemberantasan korupsi. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, VI(1), 101–116. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Maharani, F. M., et al. (2021). Pengembangan e-government sebagai langkah mewujudkan smart government di Kota Padang Panjang. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 3(1). <https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>
- Naibaho, S. (2021). Penggunaan media sosial untuk interaksi pemerintah daerah. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Pemerintahan*, 1(1), 21–30.
- Napitupulu, A. (2023). Transparansi pemerintah daerah melalui website. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 4(2), 77–88.
- Nugraha, J. T. (2018). E-government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 32–42. <https://www.academia.edu/download/64644054/228481721.pdf>
- Nurrahman, A., et al. (2021). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78–95. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i1.2126>
- Patabang, A., Syafri, W., & Kurniawati, L. (2025). Implementation of electronic-based government system (SPBE) in Pegunungan Bintang District, Papua Pegunungan Province. *INFOKUM*, 13(3), 815–827. <https://doi.org/10.58471/infokum.v13i03.2852>
- Qanita, N. M. (2023). Strategi penyebaran informasi oleh Diskominfo Jabar melalui aplikasi Si VOTUN kepada penyandang disabilitas tunanetra. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 52–61. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4561>
- Rahmadany, A. F. (2021). Literature study of electronic government implementation in the

perspective of Indonesia's electronic government ranking dimensions. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 281–292. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.281-292>

Saragih, D. M. (2022). Partisipasi digital dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Transformasi Birokrasi*, 4(1), 34–47.

Sihite, L. (2020). Insentif ASN dalam pengelolaan website pemerintah daerah. *Jurnal Kepegawaian Pemerintah*, 5(1), 59–70.

Sihombing, B. (2023). Strategi penguatan e-government di wilayah terluar: Studi kasus Papua Pegunungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Daerah*, 6(2), 112–125.

Tamba, B. (2023). Arah pengembangan e-government di wilayah 3T. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 2(2), 40–53.

Tambunan, E. (2021). Urgensi regulasi digital pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola Digital*, 3(3), 89–98.

